

# LKJIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



### DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PERTANIAN TAHUN**  
**2024**

JL. LETJEN S. PARMAN NO. 23 PURBALINGGA TEL / FAX : 0281 – 891011





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024. Laporan Kinerja Dinas Pertanian tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden siden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan laporan kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian laporan kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, 6 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
  
**REVON HAPRINDIAT, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731005 199303 1 005



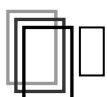
Laporan Kinerja  
Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga  
Tahun Anggaran 2024





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	6
D. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ) yang dihadapi .....	7
E. Sistematika Penyusunan LKJIP .....	7
<b>BAB II       PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	9
1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 .....	9
2. Indikator Kinerja Tujuan .....	10
3. Target Indikator Kinerja Sasaran.....	10
B. Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III       AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV       PENUTUP</b> .....	44
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

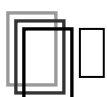
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan perangkat daerah yang handal, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

Kedudukan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga untuk selanjutnya disingkat Dinpertan, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Dinpertan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 169 orang pegawai.

Program/Kegiatan pembangunan urusan pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian telah melaksanakan 6 Program, 18 kegiatan dan 39 Sub kegiatan sumber anggaran APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 44.939.199.000,-





Jumlah PNS, CPNS dan PTT Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2024

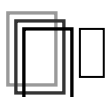
No	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		PNS	CPNS	PTT	PNS Dpb		
1	SD	1		5		6	3,26
2	SMP	2		5		7	3,80
3	SMA	24		8		32	17,39
4	D3	49				49	26,63
5	S1	72	3	2		77	41,85
6	S2	13				13	7,07
	Jumlah	161	3	20		184	100,00

Pegawai Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Golongan  
Tahun 2024

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Gol I	2		2	1,24
2	Gol II	47		47	29,19
3	Gol III	95	3	98	60,87
4	Gol IV	14		14	8,67
	Jumlah	158	3	161	100,00

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural  
Tahun 2024

No	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1	I	-
2	II	-
3	III	4
4	IV	10
	Jumlah	14

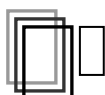


Data Pegawai Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Esselon  
Tahun 2024

No	Tingkat Esselon	Jumlah
1	II a	-
2	II b	1
3	III a	1
4	III b	2
5	IV a	12
6	IV b	2
	Jumlah	18

Pembagian Staf Dinas Pertanian Kabupaten  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah Pejabat (orang)	Jumlah Staf (orang)
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris Dinas	1	
3	Kasubag Perencanaan	1	2
4	KaSubag Umum	1	14
5	KaSubag Keuangan	1	4
6	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	1	
7	Bidang Perlindungan Pertanian	1	
8	Bidang Sumber Daya Manusia dan Bina Usaha	1	2
9	UPTD Perbenihan	1	8
10	UPTD Kesehatan Hewan	1	6
11	18 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan.	18	158
12	Kelompok Jabatan Fungsional		10



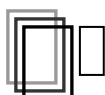


## 1. Daftar asset yang dikelola

Aset yang di kelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga meliputi Tanah/Kebun, Gedung/Kantor dan Sarana Prasarana Kantor yang meliputi, 65 Jenis barang

Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jenis,  
Jumlah dan Kondisi Tahun 2024

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	Gedung	12	8	4	-
2	Kendaraan Roda 4	6	4	1	1
3	Kendaraan Roda 2	53	25	28	-
4	Komputer	24	12	12	-
5	Laptop	8	4	-	4
6	Printer	23	12	11	-
7	Handycam	1	-	-	-
8	Camera Digital	4	4	-	-
9	Kursi Lipat	150	130	20	-
10	Kursi Tamu/Meja Tamu	7	7	-	-
11	Kursi Kayu	64	30	34	-
12	Kursi Putar	25	12	13	-
13	Meja Tulis	6	6	-	-
14	Meja Komputer	15	-	15	-
15	Meja Telephone	1	1	-	-
16	Meja Tambahan	-	-	-	-
17	Meja Rapat Pim.	-	-	-	-
19	Meja Rapat	42	42	-	-
20	Filing Kabinet	30	22	18	-
21	Rak Buku	3	3	-	-
22	Telephone	1	1	-	-
23	Telephone Lokal	14	14	-	-
24	Lemari	62	26	36	-
25	Rak Besi	-	-	-	-
26	Kursi Rapat	189	189	-	-
27	Lemari Es	3	3	-	-
28	VCD	7	7	-	-
29	TV	14	9	5	-
30	Mesin Pompa Air	4	4	-	-
31	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
32	Peti Uang	3	3	-	-
33	Vacum Cleaner	-	-	-	-
34	White Board Electric	-	-	-	-
35	Mesin Tik Manual	17	-	17	-
36	White Board	7	7	-	-

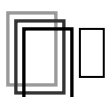


37	OHP	9	-	9	-
38	Wireless	8	-	8	-
39	Mesin Tik Electric	-	-	-	-
40	Plotter	-	-	-	-
41	Radio	5	-	5	-
42	Podium	-	-	-	-
43	Stabilizer	-	-	-	-
44	AC	4	4	-	-
45	Lemari Data	10	7	3	-
46	Jam Dinding	-	-	-	-
47	Rak Arsip	5	5	-	-
48	Screen	-	-	-	-
49	Peta	2	2	-	-
50	Kipas Angin	1	1	-	-
51	Foto Presiden/ Wakil	1	1	-	-
52	Lambang Garuda	1	1	-	-
53	Dispenser	1	1	-	-
54	UPS	-	-	-	-
55	Scanner	6	6	-	-
56	Projector	5	4	-	-
57	Faximile	1	1	-	-
58	Sound System	2	2	-	-
59	Voice Recorder	-	-	-	-
60	Finger Print	-	-	-	-
61	Fasilitas Internet	1	1	-	-
62	GPS	4	4	-	-
63	Altimeter	-	-	-	-
64	Telekompren	-	-	-	-
65	Komputer Tablet	1	1	-	-

## B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintah;





7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Sebagai pelaporan pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga atas mandat yang telah diberikan oleh Bupati Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan *akuntable* serta berorientasi pada hasil.

#### 2. Tujuan

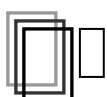
Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan ditahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja ditahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga di bentuk melalui Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Urusan yang di bebaskan oleh Bupati Purbalingga kepada Dinperten Kabupaten Purbalingga adalah Urusan Pertanian, dituangkan dalam Target Kinerja dan Program/Kegiatan Tahun 2024.

Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah dibebankan pada OPD Dinperten ditelah di susun Rencana Strategik Tahun 2021–2026 mengacu pada Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026, Khususnya misi yang ke V (Lima).

Susunan Organisasi Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Perlindungan Pertanian, Bidang Sumber Daya Manusia, UPTD Perbenihan dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

#### **D. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi**

Permasalahan utama pada urusan pertanian, di Kabupaten Purbalingga secara umum meliputi.

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global yang mengakibatkan adanya serangan hama penyakit, timbulnya bencana alam banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau,
2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana pertanian,
3. Status dan kepemilikan lahan < 0,5 Ha,
4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani,
5. Masih rawannya ketahanan pangan,
6. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik,

#### **E. Sistematika Penyusunan LKJIP**

Sistematika penulisan LKJIP Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

COVER/SAMPUL MUKA/JUDUL

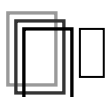
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

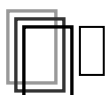
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Permasalahan Utama
- E. Sistematika Penulisan LKJIP





BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Rencana Strategis
	1. Rencana Strategis
	2. Indikator Kinerja Tujuan
	3. Target Indikator Kinerja Sasaran
	B. Penetapan Kinerja Tahun 2024
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
	B. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	



## BAB. II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

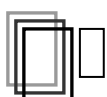
##### 1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, dimana berisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program serta kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dan memiliki benang merah dengan substansi RPJMD Kabupaten Purbalingga dimaksud.

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021–2026 yaitu: **“Purbalingga yang maju, mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan dan berakhlak mulia”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan



- potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Kinerja OPD Dinas Pertanian mengacu pada Misi Ke 5 Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu : “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan, manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”.

## **2. Indikator Kinerja Tujuan**

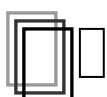
Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dengan indikator kinerja PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)

Indikator kinerja kinerja dipilih sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan pendapatan dari sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

## **3. Target Indikator Kinerja Sasaran**

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan renstra tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan nilai produksi pertanian dengan indikator sasaran nilai produksi pertanian dari sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
- 2) Meningkatnya kematangan OPD Dinas Pertanian dengan indikator sasaran Nilai Kematangan OPD
- 3) Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian dengan Indikator sasaran Nilai SAKIP Dinas Pertanian



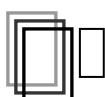
## B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pertanian Purbalingga telah Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah	6.988.400.790.000
	Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	3.493.577.855.000
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	72,15

mendasarkan pada SK Bupati Purbalingga nomor 0008/178/tahun 2024 perihal perubahan atas keputusan Bupati Purbalingga nomor 060/293 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Purbalingga dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga maka Dinas Pertanian wajib menyesuaikan dengan menyusun PK Perubahan sebagai berikut :

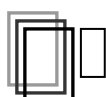




Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah	7.197.900.000.000
	Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	3.493.577.855.000
	Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Nilai kematangan perangkat daerah	Nilai	39
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	72,15

Untuk mencapai target kinerja tersebut, dinas pertanian telah didukung dengan 6 Program, 18 kegiatan dan 39 Sub kegiatan sumber anggaran APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 44.939.199.000,-

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.772.658.00
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.068.401.000
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.633.253.000
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	648.436.000
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	389.692.000
6	Program Penyuluhan Pertanian	4.426.759.000
Jumlah		44.939.199.000



### **BAB III.**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak–pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

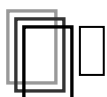
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pertanian pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk proses menjadi keluaran penting dan pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 tergambar dari capaian kinerja tujuan, sasaran serta program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2024.

Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja

1. Program penyuluhan pertanian (pembentukan kelompok pemuda tani, duta petani milenial/andalan, jaringan petani nasional, bintek, pelatihan dan magang bagi poktan/gapoktan, pendampingan dan penyuluhan penguatan kelembagaan poktan/gapoktan oleh PPL, sekolah lapang, webinar
2. Mekanisasi/modernisasi pertanian melalui bantuan alsintan, pelatihan operator alsintan, demplot/denfarm teknologi budidaya pertanian, peningkatan IP, penggunaan bibit unggul, inseminasi buatan, pakan fermentasi perbaikan pasca panen, penerapan pupuk berimbang, SIMURP
3. Pembangunan/peningkatan prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani, dam parit, embung, sumur pantek, irigasi perpipaan, pompanisasi, bantuan bibit dan gerakan penanaman tanaman keras produktif bernilai konservasi tinggi (perkebunan dan hortikultura/buah-buahan) seperti kopi, kelapa, alpokat, manggis, durian pada daerah atas/tangkapan air.

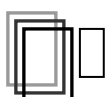


4. Perbaikan penyaluran pupuk subsidi, pengembangan pelatihan dan aplikasi pupuk organik berbahan baku lokal, pembuatan mikro organisme lokal (MOL), pupuk berimbang, pengembangan poktan penangkar benih mandiri, pemagangan penangkaran benih kentang dan strowbery dari kultur jaringan, penyediaan screen house perbenihan.
5. Gerakan pengendalian hama tanaman, sekolah lapang pengendalian hama terpadu, trap barrier system, bantuan obat pengendali OPT, bantuan alsintan pengendalian OPT, pengobatan ternak masal, vaksinasi, asuransi usaha tani padi, penanaman refugia, pembuatan rumah burung hantu (rubuha), bantuan BBM pompanisasi dan brigade alsintan.
6. Mendorong akses kredit program KUR pertanian, kredit mawar (melawan rentenir), bantuan penguatan usaha/kegiatan kelembagaan tani, pasar tani off line dan on line, kemitraan petani / poktan/gapoktan/KUB dengan perusahaan perdagangan besar dan industri, pelatihan pemasaran online, perbaikan penanganan pasca panen, grading, bantuan alat panen, pasca panen dan pengolahan (cold storage, alat/mesin kemas, pengembangan pertanian organik, pengembangan komoditas pertanian ekspor, dan gerakan konsumsi produk petani lokal).
7. Optimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian secara berkala

Perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rivuew Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinas sebagai berikut :

**Skala Nilai Perangkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah



Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian %	Target Masa Akhir Rentra (2021-2026)
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah	7.197.885.240.000	7.197.900.000.000	7.587.800.000.000	105,42	7.320.772.390.000
	Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	3.490.087.767.675	3.493.577.855.000	3.522.750.475.282	100,84	2.850.242.905.000
	Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Nilai Kematangan OPD	Nilai	38	39	38	97,44	-
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	72,11	72,15	72,16	100,01	72,25
Rata-Rata Capaian Kinerja							100,93	

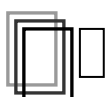
Dari tabel diatas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga di Tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian kinerja **100,93** % atau kategori **Sangat Tinggi**.

Pencapaian atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dengan Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)**

Target dan realisasi indikator kinerja indikator PDRB Pertanian Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah	7.197.900.000.000	7.587.800.000.000	105,42



Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) dengan target sebesar Rp. 7.197.900.000.000

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB

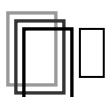
bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Capaian PDRB sektor Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar Rp. 7.587.800.000.000 atau 105,42% dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.197.900.000.000





Rincian PDRB tahun 2024 per sub sektor dapat dilihat pada tabel dibawah :

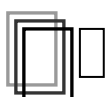
No	Sub Sektor	Nilai PDRB (Rp)	%
1	Tanaman Pangan	1.437.650.000.000	18,95
2	Perkebunan	1.663.510.000.000	21,92
3	Hortikultura	2.556.690.000.000	33,69
4	Peternakan	1.929.950.000.000	25,43
Jumlah		7.587.800.000.000	100,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat sumbangan tertinggi PDRB sektor pertanian dari sub sektor hortikultura sebesar Rp. 2.556.690.000.000 atau 33,69% dari total nilai PDRB sektor pertanian, disusul dari sub sektor peternakan (25,43%), perkebunan (21,92%) dan yang terakhir dari sub sektor tanaman pangan (18,95%).

Tabel Perbandingan Nilai PDRB Tahun 2021-2024

No	Tujuan dan Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian							
	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	6.302.463.080.000	6.820.997.970.000	7.197.885.240.000	7.197.900.000.000	7.587.800.000.000	105,42	103,65

Nilai PDRB sektor pertanian tahun 2024 sebesar Rp. 7.587.800.000.000 apabila dibandingkan dengan nilai PDRB sektor pertanian tahun 2023 sebesar Rp. 7.197.885.240.000 terdapat peningkatan nilai PDRB sektor pertanian yang signifikan yaitu sebesar Rp. 389.914.760.000 atau 5,14%, selama periode 5 tahun PDRB sektor pertanian nilai PDRB selalu naik, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 518.534.890.000 atau 8,23%. Apabila dibandingkan dengan target nilai PDRB sektor pertanian akhir renstra tahun 2026 sebesar Rp. 7.320.772.390.000 maka capaian nilai PDRB sektor pertanian di tahun 2024 sudah 103,65% dari target tahun terakhir renstra.



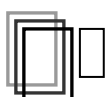
Tabel perbandingan realisasi kinerja indikator PDRB Pertanian Tahun 2024  
dengan target akhir Renstra (2021-2026)

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Masa Akhir Renstra (2021-2026)	Persentase capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah	7.587.800.000.000	7.320.772.390.000	103,65

Dilihat dari tabel diatas maka pada tahun 2024 PDRB Bidang Pertanian sudah mencapai 103,65% dari target yang ditetapkan akhir renstra tahun 2026.

Keberhasilan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam bidang pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Beberapa faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

- Penggunaan teknologi terbaru dalam produksi pertanian dapat meningkatkan hasil produksi, efisiensi, dan daya saing produk pertanian. Misalnya, penggunaan varietas tanaman unggul, alat pertanian modern, serta teknik pertanian ramah lingkungan.
- Penyediaan modal atau akses pembiayaan bagi petani sangat penting untuk memperbaiki infrastruktur, membeli peralatan baru, atau melakukan investasi lainnya yang mendukung peningkatan produksi.
- Pendidikan dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha pertanian, memahami pasar, serta mengadopsi teknologi baru.
- Penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, sistem irigasi yang efisien, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian, dapat mendukung proses distribusi hasil pertanian dengan biaya yang lebih rendah dan efisien.
- Kebijakan yang mendukung sektor pertanian, seperti subsidi pupuk, perlindungan harga, serta pemberian insentif bagi petani atau pelaku industri pertanian, dapat meningkatkan motivasi dan keberhasilan usaha di sektor ini.
- Pengelolaan sumber daya alam seperti lahan dan air dengan bijaksana akan membantu keberlanjutan produksi pertanian dalam jangka panjang.

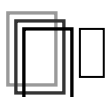


- Diversifikasi produk pertanian, baik dalam hal jenis tanaman maupun produk olahan, dapat meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.
- Ketersediaan pasar yang baik, baik di tingkat lokal maupun internasional, serta sistem distribusi yang efisien, akan meningkatkan daya saing produk pertanian dan mengoptimalkan pendapatan petani.
- Menghadapi perubahan iklim yang dapat mempengaruhi hasil pertanian, penting untuk mengadopsi sistem pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan lebih ramah lingkungan, sehingga produksi tetap berkelanjutan.
- Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga riset, dan petani untuk bersama-sama mencari solusi dan meningkatkan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Faktor-faktor tersebut saling mendukung dan dapat mempengaruhi keberhasilan peningkatan PDRB sektor pertanian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di bidang pertanian dapat terhambat oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menghambat pencapaian PDRB sektor pertanian:

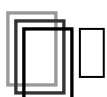
- Curah hujan yang tidak menentu, kekeringan, atau banjir dapat merusak hasil pertanian.
- Erosi, tanah tandus, dan pencemaran tanah mengurangi produktivitas lahan pertanian.
- Serangan hama seperti wereng dan ulat grayak serta penyakit tanaman menurunkan hasil panen.
- Minimnya modal untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur pertanian menghambat peningkatan produktivitas.
- Harga komoditas pertanian yang tidak stabil menyebabkan ketidakpastian pendapatan bagi petani.
- Harga pupuk, benih, dan alat pertanian yang mahal membebani petani dan mengurangi keuntungan.



- Banyak tenaga kerja muda yang beralih ke sektor lain karena menganggap pertanian kurang menjanjikan.
- Pemahaman yang kurang mengenai teknologi pertanian modern dan manajemen usaha pertanian.
- Rendahnya penggunaan alat dan metode pertanian modern menyebabkan efisiensi yang rendah.
- Minimnya Infrastruktur seperti Jalan yang buruk, irigasi yang kurang memadai, dan fasilitas penyimpanan yang terbatas menyebabkan kesulitan distribusi dan penyimpanan hasil panen.
- Kurangnya dukungan pemerintah, bantuan subsidi dan insentif yang tidak merata atau sulit diakses oleh petani.
- Regulasi yang tidak mendukung, kebijakan impor yang tidak terkendali dapat menekan harga hasil pertanian lokal.
- Distribusi dan rantai pasok yang lemah, sistem distribusi yang tidak efisien meningkatkan biaya logistik dan mengurangi keuntungan petani.

Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pertanian, diperlukan berbagai solusi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, teknologi, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diterapkan :

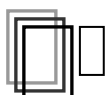
- Mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian modern (traktor, drone pertanian, sensor tanah, dll.).
- Penerapan pertanian presisi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, pupuk, dan pestisida
- Mengembangkan dan mendistribusikan benih unggul yang tahan hama dan cuaca ekstrem.
- Mendorong pertanian berbasis teknologi, seperti hidroponik dan pertanian vertikal
- Membangun dan memperbaiki jaringan irigasi agar air dapat didistribusikan dengan lebih baik.
- Memperbanyak akses ke kredit pertanian dengan bunga rendah untuk petani.



- Memberikan subsidi pupuk, benih, dan alat pertanian secara tepat sasaran
- Mengadopsi teknik irigasi hemat air seperti irigasi tetes (drip irrigation).
- Mendorong investasi di bidang agroteknologi dan pengolahan hasil pertanian.
- Mengadakan pelatihan tentang teknologi pertanian modern, manajemen usaha tani, dan diversifikasi produk.
- Meningkatkan jumlah penyuluh pertanian yang aktif di lapangan.
- Mengajak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dengan program insentif dan pelatihan startup pertanian.
- Mengembangkan ekosistem pertanian berbasis digital (marketplace pertanian, aplikasi cuaca, dll.).
- Mendorong petani untuk memanfaatkan platform e-commerce dan marketplace pertanian.
- Memperkuat sistem pemasaran berbasis digital untuk memotong rantai distribusi yang panjang.

Untuk mencapai target tersebut diatas didukung oleh beberapa program yaitu :

- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
  - Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
  - Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
  - Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota





- Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
  - Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
  - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Program penyuluhan pertanian
  - Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

## 2. Meningkatnya nilai produksi pertanian dengan indikator Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan

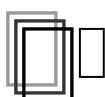
Tabel target dan realisasi indikator kinerja sasaran nilai produksi

Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	3.493.577.855.000	3.522.750.475.282	100,84

Nilai produksi pertanian adalah nilai dari komoditas pertanian yang dihasilkan oleh sektor produksi pertanian, merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi pertanian dengan harga per unit komoditas pertanian tersebut. Harga per unit dinyatakan pada harga produsen pada saat komoditas tersebut diproduksi.

Dilihat dari data terakhir, nilai produksi pertanian sebesar Rp. 3.522.750.475.282 melebihi dari target Rp. 3.493.577.855.000 yang telah ditetapkan atau 100,84%, nilai produksi tersebut berasal dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.



#### Nilai Produksi Pertanian Tahun 2024

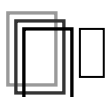
No	Komoditas	Nilai Produksi	%
1	Tanaman pangan	1.400.281.393.487	39,75%
2	Hortikultura dan perkebunan	903.309.927.395	25,64%
3	Peternakan	1.219.159.154.400	34,61%
Jumlah		3.522.750.475.282	100,00%

Dari tabel diatas, sumbangan terbesar untuk nilai produksi diperoleh dari komoditas tanaman pangan sebesar Rp. 1.400.281.393.487,- dari total nilai produksi pertanian Rp. 3.522.750.475.282 atau sebesar 39,75%, disusul oleh nilai produksi komoditas peternakan sebesar Rp. 1.219.159.154.400 atau 34,61%, dan komoditas perkebunan dan hortikultura sebesar 903.309.927.395 atau 25,64%.

#### Nilai Produksi Pertanian dari komoditas Tanaman Pangan

No	Komoditas	Produksi	Satuan	Harga (Rp.)	Nilai Produksi (Rp.)	%
1	Padi	160.167.319	kg	7.165	1.147.598.837.769	81,95%
2	Jagung	48.200.841	kg	5.175	249.439.349.588	17,81%
3	Kedelai	301.975	kg	10.740	3.243.206.130	0,23%
Sub Total					1.400.281.393.487	100,00 %

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi padi sebesar Rp. 1.147.598.837.769,- dari total nilai produksi pertanian tanaman pangan Rp. 1.400.281.393.487 atau sebesar 81,95%, disusul oleh nilai produksi jagung sebesar Rp. 249.439.349.588 atau 17,81%, dan kedelai sebesar Rp. 3.243.206.130 atau 0,23%, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi tanaman pangan berasal dari komoditas padi (81,95%) hal ini menunjukkan bahwa nilai produksi tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh komoditas padi, sedangkan jagung menyumbang 17,81% dan kedelai hanya menyumbang 0,23% dari nilai produksi tanaman pangan.



#### Nilai Produksi Komoditas Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024

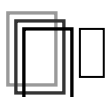
No	Komoditas	Produksi	Satuan	Harga (Rp)	Nilai Produksi (Rp.)	%
1	Manggis	793.390	kg	9.000	7.140.510.000	0,79%
2	Durian	1.956.450	kg	30.000	58.693.500.000	6,50%
3	Kelapa Dalam	11.716.088	kg	3.000	35.148.264.240	3,89%
4	Kelapa Deres	56.327.083	kg	13.600	766.048.333.832	84,80%
5	Lada	218.191	kg	103.300	22.539.130.300	2,50%
6	Kopi	216.381	kg	63.500	13.740.189.023	1,52%
Sub Total					903.309.927.395	100,00%

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi dari tanaman hortikultura dan perkebunan sebesar Rp. 903.309.927.395,- persentase tertinggi sumbangan nilai produksi hortikultura dan perkebunan berasal dari komoditas kelapa deres 84,80%, disusul oleh durian 6,50%, sedangkan sumbangan terkecil dari komoditas manggis yaitu 0,79%.

#### Nilai produksi komoditas peternakan Tahun 2024

No	Komoditas	Populasi	Satuan	Rata-rata per ekor sapi / produktivitas petelur pertahun	Jumlah Daging/Telur (kg)	Harga	Total harga	Persentase (%)
1	Sapi	12.245	ekor	175	2.142.875	125.000	267.859.375.000	21,97%
2	Kambing	282.272	ekor	12,24	3.455.009,3	136.000	469.881.262.080	38,54%
3	Ayam Broiler (pedaging)	6.698.486	ekor	1,13	7.569.289,2	24.000	181.662.940.320	14,90%
4	Ayam Layer (petelur)	793.550	ekor	17,17	13.625.253,5	22.000	299.755.577.000	24,59%
Jumlah							1.219.159.154.400	100,00%

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi dari komoditas peternakan sebesar Rp. 1.219.159.154.400, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi peternakan berasal dari komoditas kambing (38,54%), disusul oleh ayam layer (24,59%), sapi (21,97%), dan broiler (14,90%). Perhitungan komoditas peternakan untuk masing-masing komoditas dilakukan konversi daging, hal ini disebabkan karena harga

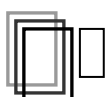


jualnya berdasarkan berat daging (kg), konversi sapi 1 ekor menghasilkan karkas 175 kg (50% dari berat hidup) dan daging sebanyak 75 % dari berat karkas, konversi 1 ekor kambing menghasilkan karkas 12,24 kg dan daging sebanyak 70 persen dari berat karkas, konversi 1 ayam broiler menghasilkan karkas sebanyak 1,13 kg dan nilai produksi ayam petelur dihitung dari produktivitas ayam petelur dalam setahun sebesar 17,17 kg/tahun

Tabel perbandingan nilai produksi dari Tahun 2019-2024

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya nilai produksi pertanian							
	Nilai produksi pertanian	2.630.804.899.000	2.741.168.897.550	3.490.087.767.675	3.493.577.855.000	3.522.750.475.282	100,84 %	3.500.568.504.000

Nilai produksi pertanian Tahun 2022 sebesar Rp. 2.741.168.897.550 apabila dibandingkan dengan nilai produksi pertanian tahun 2021 sebesar Rp. 2.630.804.899.000 terdapat peningkatan sebesar Rp. 110.363.998.550 atau sekitar 4,03%, kemudian bila dibandingkan nilai produksi tahun 2023 dengan tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp. 748.918.870.125 atau 21,46%. Nilai produksi pertanian Tahun 2024 sebesar Rp. 3.522.750.475.282 apabila dibandingkan dengan nilai produksi pertanian tahun 2023 sebesar Rp. 3.490.087.767.675 terdapat peningkatan sebesar Rp. 32.662.707.607 atau sekitar 0,94% Peningkatan produksi tahun 2024 lebih kecil dibandingkan peningkatan produksi tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target nilai produksi pertanian akhir renstra tahun 2026 sebesar Rp. 3.500.568.504.000 maka capaian nilai produksi pertanian di tahun 2024 sudah 100,63% dari target nilai produksi pertanian tahun terakhir renstra.



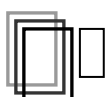
Tabel perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran nilai produksi pertanian  
Tahun 2024 dengan target akhir Renstra (2021-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Masa Akhir Renstra (2021-2026)	Persentase capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra (%)
Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	3.522.750.475.282	3.500.568.504.000	100,63

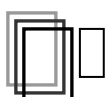
Dari tabel diatas dapat dilihat apabila dibandingkan dengan target nilai produksi pertanian akhir renstra tahun 2026 sebesar Rp. 3.500.568.504.000 maka capaian nilai produksi pertanian di tahun 2024 sudah 100,63% dari target nilai produksi pertanian tahun terakhir renstra

Keberhasilan peningkatan nilai produksi pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan sumber daya alam, teknologi, ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berperan dalam meningkatkan nilai produksi pertanian

- Tanah yang subur dengan kandungan hara yang cukup meningkatkan produktivitas tanaman.
- Pengelolaan tanah dengan pupuk organik dan pemupukan berimbang membantu menjaga kesuburan.
- Air yang cukup dan sistem irigasi yang baik mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal.
- Teknologi irigasi modern seperti irigasi tetes dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air.
- Curah hujan, suhu, dan kelembaban sangat berpengaruh pada hasil pertanian.
- Penggunaan teknologi seperti rumah kaca dan sistem prediksi cuaca dapat membantu petani menghadapi perubahan iklim.
- Benih yang tahan hama, penyakit, dan perubahan cuaca dapat meningkatkan hasil panen.
- Varietas tanaman dengan produktivitas tinggi dapat memberikan hasil lebih banyak per hektar.



- Penggunaan alat dan mesin pertanian seperti traktor, drone, dan sensor tanah meningkatkan efisiensi produksi.
- Penerapan smart farming (pertanian berbasis data) membantu optimalisasi penggunaan sumber daya.
- Penggunaan pestisida nabati, rotasi tanaman, dan teknik pengendalian hama terpadu (PHT) menjaga hasil panen tetap tinggi.
- Penggunaan bioteknologi untuk ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit.
- Kredit pertanian dengan bunga rendah membantu petani memperoleh modal untuk membeli benih, pupuk, dan peralatan.
- Investasi dalam infrastruktur pertanian dan rantai pasok meningkatkan nilai produksi.
- Harga yang stabil dan menguntungkan mendorong petani untuk meningkatkan produksi.
- Penguatan koperasi dan sistem kontrak farming bisa melindungi petani dari fluktuasi harga.
- Pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah seperti tepung, minyak, dan makanan olahan meningkatkan nilai ekonomi.
- Diversifikasi produk seperti menanam berbagai jenis tanaman atau menggabungkan pertanian dengan peternakan meningkatkan pendapatan petani.
- Pelatihan dan penyuluhan pertanian membantu petani mengadopsi teknologi terbaru.
- Meningkatkan manajemen usaha tani agar petani lebih efisien dalam mengelola produksi dan pemasaran.
- Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pertanian dengan program insentif dan inovasi digital.
- Menciptakan ekosistem pertanian yang menarik bagi anak muda melalui agroteknologi dan agribisnis modern.
- Faktor Infrastruktur Jalan, gudang penyimpanan, dan sistem rantai dingin yang memadai mencegah kerusakan produk pertanian.
- Infrastruktur yang baik mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan daya saing produk di pasar.





- Pemanfaatan platform digital dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar.
- Kerja sama dengan supermarket dan eksportir untuk meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas.
- Harga pupuk, pestisida, dan alat pertanian yang terjangkau meningkatkan daya beli petani.
- Kebijakan subsidi yang tepat sasaran membantu petani mengakses sarana produksi dengan lebih mudah.
- Subsidi pupuk, benih, dan alat pertanian untuk meningkatkan produksi.
- Insentif pajak bagi petani dan pelaku agribisnis untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian.

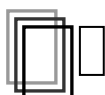
Hambatan-hambatan dalam pencapaian target sasaran kinerja :

Adapun permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja yaitu

- Adanya fluktuasi harga produk pertanian terutama untuk produk hortikultura
- Alih fungsi lahan pertanian untuk sektor industri dan properti
- SDM Pertanian yang masih rendah dan budidaya pertanian tradisional
- Belum memadainya infrastruktur bidang pertanian
- Mekanisasi pertanian yang masih rendah
- Adanya serangan hama penyakit tanaman karena cuaca yang ekstrim
- Masuknya penyakit baru yang menyerang pada ternak yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan tingkat morbiditas (kesakitan) yang sangat mencapai 100%.
- Modal petani yang masih lemah

Solusi dan inovasi yang dilakukan Dinas pertanian untuk masalah tersebut untuk tersebut diatas adalah :

- Program penyuluhan pertanian (pembentukan kelompok pemuda tani, duta petani milenial/andalan, jaringan petani nasional, bintek, pelatihan dan magang bagi poktan/gapoktan, pendampingan dan penyuluhan penguatan kelembagaan poktan/gapoktan oleh PPL, sekolah lapang, webinar
- Mekanisasi/modernisasi pertanian melalui bantuan alsintan, pelatihan operator alsintan, demplot/denfarm teknologi budidaya pertanian,

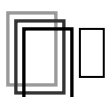


peningkatan IP, penggunaan bibit unggul, inseminasi buatan, pakan fermentasi perbaikan pasca panen, penerapan pupuk berimbang, SIMURP

- Pembangunan/peningkatan prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani, dam parit, embung, sumur pantek, irigasi perpipaan, pompanisasi, bantuan bibit dan gerakan penanaman tanaman keras produktif bernilai konservasi tinggi (perkebunan dan hortikultura/buah-buahan) seperti kopi, kelapa, alpokat, manggis, durian pada daerah atas/tangkapan air.
- Perbaikan penyaluran pupuk subsidi, pengembangan pelatihan dan aplikasi pupuk organik berbahan baku lokal, pembuatan mikro organisme lokal (MOL), pupuk berimbang, pengembangan poktan penangkar benih mandiri, pemagangan penangkaran benih kentang dan strowbery dari kultur jaringan, penyediaan screen house perbenihan.
- Gerakan pengendalian hama tanaman, sekolah lapang pengendalian hama terpadu, trap barrier system, bantuan obat pengendali OPT, bantuan alsintan pengendalian OPT, pengobatan ternak masal, vaksinasi, asuransi usaha tani padi, penanaman refugia, pembuatan rumah burung hantu (rubuha), bantuan BBM pompanisasi dan brigade alsintan.
- Mendorong akses kredit program KUR pertanian, kredit mawar (melawan rentenir), bantuan penguatan usaha/kegiatan kelembagaan tani, pasar tani off line dan on line, kemitraan petani / poktan/gapoktan/KUB dengan perusahaan perdagangan besar dan industri, pelatihan pemasaran online, perbaikan penanganan pasca panen, grading, bantuan alat panen, pasca panen dan pengolahan (cold storage, alat/mesin kemas, pengembangan pertanian organik, pengembangan komoditas pertanian eksport, dan gerakan konsumsi produk petani lokal.

### **3. Tujuan meningkatnya kualitas kelembagaan Dinperten dengan indikator Nilai Kematangan Dinperten**

Nilai Kematangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah ukuran atau tingkat kedewasaan (maturity level) suatu instansi pemerintah daerah dalam mengelola tata kelola, kinerja, dan akuntabilitasnya. Nilai ini menggambarkan



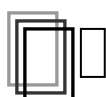
sejauh mana OPD telah mengembangkan sistem, proses, dan kapabilitas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Nilai kematangan OPD biasanya dinilai berdasarkan beberapa aspek, seperti perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pengelolaan anggaran, pengendalian internal, Variabel kematangan perangkat daerah:

- Perencanaan pembangunan daerah
- Monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah
- Penjaminan mutu layanan perangkat daerah
- Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perangkat daerah
- Pendidikan dan pelatihan aparatur
- Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah
- Manajemen sumberdaya yang terukur
- Manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur
- Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur
- Pengembangan inovasi pelayanan perangkat daerah
- Budaya organisasi perangkat daerah, transparansi, dan akuntabilitas.

Tabel Nilai dan kematangan OPD Dinas Pertanian per variabel tahun 2024

No	Variabel	Nilai
1	Perencanaan pembangunan daerah	5
2	Monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah	5
3	Penjaminan mutu layanan perangkat daerah	3
4	Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perangkat daerah	2
5	Pendidikan dan pelatihan aparatur	5
6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah	3
7	Manajemen sumberdaya yang terukur	3
8	Manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur	4
9	Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur	4
10	Pengembangan inovasi pelayanan perangkat daerah	2
11	Budaya organisasi perangkat daerah, transparansi, dan akuntabilitas	2
	Jumlah	38



Tabel target dan realisasi kematangan OPD Dinas Pertanian  
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai Kematangan OPD	Nilai	39	38	97,44

Hasil atas evaluasi kematangan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mendapatkan nilai 38 atau predikat Tinggi yang berarti bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi sudah baik, namun demikian apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 39, capaian realisasi 97,88%, sehingga diperlukan usaha yang lebih keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel perbandingan nilai kematangan OPD dari Tahun 2019-2024

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinperten							
	Nilai Kematangan Dinperten	NA	35	38	39	38	97,44 %	NA

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai kematangan perangkat daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan. Sedangkan tahun 2024 memperoleh nilai yang tidak berubah dari tahun 2023

Tabel perbandingan realisasi indikator kematangan OPD Dinas Pertanian  
Tahun 2024 dengan target akhir Rentra (2021-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Masa Akhir Rentra (2021-2026)	Persentase capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra (%)
Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai Kematangan OPD	Nilai	30	N/A	-

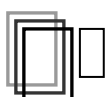
Secara keseluruhan, untuk mencapai kematangan, OPD harus berusaha meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki manajemen, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan inovasi.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target nilai kematangan OPD antara lain :

- Keterbukaan dalam sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Implementasi prinsip good governance, seperti partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- Pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan.
- Inovasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
- Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan hasil yang terukur.
- Penerapan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan dan peningkatan kinerja.

Faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian target nilai kematangan OPD antara lain :

- Kurangnya keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman di kalangan pegawai OPD dapat menghambat upaya peningkatan kematangan. SDM yang tidak terlatih atau tidak cukup kompeten dalam tugas dan tanggung jawab mereka dapat menyebabkan kesulitan dalam implementasi kebijakan dan program.
- Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi atau sistem yang tidak terintegrasi dapat menghambat efisiensi operasional OPD. Sistem yang usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi akan menghalangi pencapaian kematangan.
- Terbatasnya anggaran sering kali menjadi salah satu kendala dalam mencapai kematangan OPD. Tanpa dana yang cukup, sulit untuk mengimplementasikan program yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas dan efektivitas organisasi.
- Tanpa adanya evaluasi yang baik terhadap kinerja dan hasil yang dicapai, OPD sulit untuk mengetahui kelemahan dan area yang perlu perbaikan. Monitoring yang tidak efektif membuat proses peningkatan kematangan menjadi terhambat.

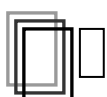


Untuk mencapai nilai kematangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain :

- Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.
- Menyederhanakan prosedur administrasi dan birokrasi yang berbelit untuk mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
- Mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan publik, serta pemantauan dan evaluasi kinerja
- Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan inovasi. Mendorong pegawai untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi dan meningkatkan kinerja OPD.
- Menyusun rencana strategis jangka panjang yang jelas dengan indikator pencapaian yang terukur. Rencana ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.
- Secara berkala mengevaluasi dan menyesuaikan visi, misi, serta tujuan OPD agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan daerah.

Berikut beberapa program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kematangan OPD :

- Program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan manajerial bagi pegawai OPD, seperti pelatihan manajemen publik, kepemimpinan, penggunaan teknologi informasi, serta kemampuan analisis dan pengambilan keputusan.
- Kegiatan pelatihan kepada pegawai mengenai penggunaan sistem informasi dan perangkat teknologi terbaru untuk mendukung kinerja mereka dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.
- Program pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terukur, dengan menetapkan indikator kinerja yang dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan OPD tercapai.
- Kegiatan penyusunan inovasi yang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, misalnya dengan membuka pusat layanan terpadu, menggunakan teknologi untuk layanan online, atau mempermudah prosedur administrasi.



#### 4. Nilai SAKIP Dinas Pertanian

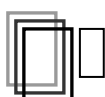
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri, yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

Tabel realisasi nilai sakip Dinas Pertanian Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	72,15	72,16	100,01

Hasil atas evaluasi SAKIP pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mendapatkan **nilai 72,16 atau predikat BB** yang berarti bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3.



Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

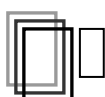
No	Komponen	Bobot komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,4	6,30	10,50	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	5,4	6,3	9	20,07
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,4	3,6	5,25	11,25
4	Evalusi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	4,5	6,0	7,5	18,00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100,00</b>	<b>17,70</b>	<b>22,20</b>	<b>32,25</b>	<b>72,16</b>

Target nilai SAKIP yang ada di perjanjian kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024 sebesar 72,15 sedangkan realisasi sebesar 72,16 maka capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga pada indikator Nilai SAKIP adalah sebesar 100,01%.

Dari hasil Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian Tahun 2024 ada beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inpektorat Kabupaten Purbalingga yaitu :

a. Komponen perencanaan kinerja

- Memperbaiki pohon kinerja sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.
- Seluruh pegawai agar menyusun Sasaran Kinerja Pegawai secara berkala di awal tahun
- Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja pada esr menpan dan website secara tepat waktu
- Mendokumentasikan PK Eselon IV secara memadai
- PK Eselon IV dan/ Jabatan Fungsional yang ditunjuk melaksanakan tugas eselon IV agar mengintervensi/memperjanjikan kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2024





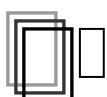
- Memperbaiki Sistematika dan Matrik Rancangan Akhir Renja 2025 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- Melakukan penyesuaian indikator kinerja sub kegiatan pada dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan mengacu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulan.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- Melakukan rivi terhadap seluruh komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja agar indikator dan target kinerja diterapkan secara konsisten dalam mengukur kinerja organisasi terutama pada dokumen Rencana Aksi, PPS dan PKPK.
- Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia : E-SAKIP ([sakip.purbalinggakab.go.id](http://sakip.purbalinggakab.go.id)) dan <https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id>
- Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (reward dan Punishment) atas prestasi kerja pegawai sebagai upaya memotivasi peningkatan kinerja pegawai.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

- Meningkatkan kualitas laporan kinerja tahunan dengan menyajikan analisis efisiensi masing-masing Indikator Kinerja Utama atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya terutama dalam penyusunan target-target kinerja periode selanjutnya
- Mendokumentasikan data laporan kinerja masing-masing pegawai/unit sebagai penyusun penilaian kinerja kegiatan/program/sasaran/tujuan organisasi dengan baik



d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektivitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Upaya atas tindak lanjut rekomendasi agar didokumentasikan dan dimonitor pelaksanaannya secara berkala
- Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut serta menyajikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Laporan Kinerja Tahun 2024.
- Melakukan monitoring atas tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 dan memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

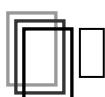
Tabel perbandingan nilai SAKIP Dinas Pertanian Tahun 2022-2024.

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	2021	2022		2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya implentasi SAKIP di Dinas Pertanian								
	Nilai SAKIP Dinperten	NA	76,36		72,11	76,15	76,16	100,01 %	NA

Jika dibandingkan dengan realisasi nilai SAKIP Dinas Pertanian pada Tahun 2023 sebesar 72,11 maka pada tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 0,07%. Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan dalam implementasi SAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024.

Tabel perbandingan realisasi indikator nilai SAKIP OPD Dinas Pertanian Tahun 2024 dengan target akhir Rentra (2021-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Masa Akhir Rentra (2021-2026)	Persentase capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra (%)
Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai SAKIP	Nilai	72,16	N/A	-



Faktor keberhasilan dalam pencapaian target kinerja :

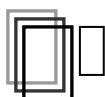
- Renstra yang terukur memberikan arah yang jelas bagi setiap unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Tujuan dan indikator kinerja yang realistis dan dapat diukur sangat mendukung pencapaian kinerja yang baik, yang nantinya dapat diakui dalam penilaian SAKIP.
- Pengelolaan kinerja yang dilakukan dengan baik, mulai dari penetapan indikator kinerja yang relevan, pemantauan, hingga evaluasi kinerja yang teratur, akan menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan transparan.
- Kualitas SDM yang kompeten, terlatih, dan memiliki pemahaman mengenai SAKIP dan pentingnya akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi kinerja.
- Efektivitas penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kinerja
- Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang baik untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja :

- Peran Tim SAKIP internal Dinas Pertanian belum optimal sehingga evaluasi SAKIP pada Dinas Pertanian belum sesuai yang diharapkan.
- Dalam pengumpulan data dari bidang kadang terlambat karena menunggu data dari kecamatan untuk diolah oleh admin pengolah data
- Kurangnya perhatian masing-masing personil terhadap pentingnya SAKIP sebagai indikator kinerja Dinas Pertanian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas strategi yang dilaksanakan Dinas Pertanian untuk mengatasi masalah/hambatan tersebut adalah :

- Optimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian secara berkala
- Mengadakan pertemuan/sosialisasi dengan admin BPP Kecamatan agar dapat menyetorkan data tepat waktu
- Memasukan materi tentang SAKIP pada setiap RAKOR POK internal Dinas Pertanian



Untuk meningkatkan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada OPD, diperlukan program yang dapat membantu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja. Berikut beberapa program dan kegiatan mendukung peningkatan nilai SAKIP OPD :

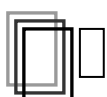
- Program sosialisasi dan internalisasi budaya kinerja dengan melibatkan seluruh pegawai dalam membangun pola pikir berbasis kinerja.
- Kegiatan forum evaluasi kinerja pemerintah dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perbaikan dan inovasi berbasis hasil evaluasi kinerja
- Kegiatan pemantauan realisasi program dan capaian kinerja secara berkala.

## B. Realisasi Anggaran

Dinas Pertanian mendapatkan anggaran sebesar Rp. 39.162.087.000 terbagi menjadi 6 Program, 18 kegiatan dan 39 Sub kegiatan

Realiasi Anggaran program terperinci dalam tabel berikut

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Keterangan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.772.658.000	23.747.654.974	95,86%	Indikator kinerja sasaran Nilai Kematangan OPD dan Nilai SAKIP
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.068.401.000	7.010.872.638	99,19%	Indikator tujuan PDRB Pertanian
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.633.253.000	7.489.369.732	98,12%	Indikator tujuan PDRB Pertanian
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	648.436.000	610.697.500	94,18%	Indikator tujuan PDRB Pertanian
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	389.692.000	373.996.100	95,97%	Indikator tujuan PDRB Pertanian
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.426.759.000	4.168.688.039	94,17%	Indikator tujuan PDRB Pertanian
<b>JUMLAH</b>		<b>44.939.199.000</b>	<b>43.401.278.983</b>	<b>96,58%</b>	



### Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran

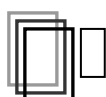
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran		Tingkat efektivitas anggaran
				(Rp)	%	
1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	105,42	43.401.278.983	96,58	8,84
	Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	100,84	43.401.278.983	96,58	4,26
	Meningkatnya kualitas kselembagaan Dinas Pertanian	Nilai Kematangan OPD	97,44	23.747.654.974	95,86	1,58
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	100,01	23.747.654.974	95,86	4,15

Adapun analisis terkait dengan efisiensi sumber daya seperti dalam tabel dibawah ini :

No	Tujuan/Sasaran	Capaian			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	7.197.900.000.000	7.587.800.000.000	105,42	44.939.199.000	43.401.278.983	96,58	Efisien
	Meningkatnya nilai produksi pertanian	3.493.577.855.000	3.522.750.475.282	100,84	44.939.199.000	43.401.278.983	96,58	Efisien
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinas Pertanian	39	38	97,44	24.772.658.000	23.747.654.974	95,86	Efisien
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	72,15	72,16	100,01	39.162.087.000	23.747.654.974	95,86	Efisien

### Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja

Berdasarkan tabel yang diberikan, analisis efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan (dalam persentase). Efisiensi diukur dari seberapa baik realisasi anggaran sesuai dengan rencana awal, serta apakah target kinerja (capaian) telah tercapai. Berikut analisisnya :



### 1. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian

- Target Capaian: 7.197.900.000.000
- Realisasi Capaian: 7.587.800.000.000
- Persentase Capaian : 105,42%
- Anggaran: Rp 44.939.199.000
- Realisasi Anggaran: Rp 43.401.278.983
- Tingkat Efisiensi Anggaran: 96,58%

#### Analisis:

- Capaian kinerja melebihi target (105,42%), menunjukkan kinerja yang sangat baik
- Realisasi anggaran mencapai 96,58%, yang menunjukkan efisiensi yang baik karena hampir mendekati 100%.

### 2. Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian

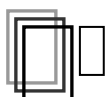
- Target Capaian: 3.493.577.855.000
- Realisasi Capaian: 3.522.750.475.282
- Persentase Capaian: 100,84%
- Anggaran: Rp 44.939.199.000
- Realisasi Anggaran: Rp 43.401.278.983
- Tingkat Efisiensi Anggaran: 96,58%

#### Analisis:

- Capaian kinerja melebihi target (100,84%), menunjukkan kinerja yang sangat baik.
- Realisasi anggaran mencapai 96,58%, yang juga menunjukkan efisiensi yang tinggi.
- Program ini efisien karena target kinerja tercapai dengan penggunaan anggaran yang optimal.

### 3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinas Pertanian

- Target Capaian: 39
- Realisasi Capaian: 38
- Persentase Capaian: 97,44%
- Anggaran: Rp 24.772.658.000
- Realisasi Anggaran: Rp 23.747.654.974
- Tingkat Efisiensi Anggaran: 95,86%



Analisis:

- Capaian kinerja hampir memenuhi target (97,44%), menunjukkan kinerja yang baik.
- Realisasi anggaran mencapai 95,86%, yang menunjukkan efisiensi yang tinggi.
- Program ini efisien karena target kinerja hampir tercapai dengan penggunaan anggaran yang optimal.

#### 4. Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinas Pertanian

- Target Capaian: 72,15
- Realisasi Capaian: 72,16
- Persentase Capaian: 100,01%
- Anggaran: Rp 39.162.087.000
- Realisasi Anggaran: Rp 23.747.654.974
- Tingkat Efisiensi Anggaran: 95,86%

Analisis:

- Capaian kinerja melebihi target (100,01%), menunjukkan kinerja yang sangat baik.
- Realisasi anggaran mencapai 95,86%, yang menunjukkan efisiensi yang tinggi.
- Program ini efisien karena target kinerja tercapai dengan penggunaan anggaran yang optimal.

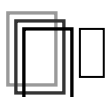
#### Kesimpulan Analisis Efisiensi:

##### 1. Efisiensi Anggaran:

- Semua program memiliki realisasi anggaran di atas 95%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran secara keseluruhan efisien.

##### 2. Capaian Kinerja:

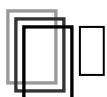
- Semua program mencapai atau melebihi target kinerja, menunjukkan kinerja yang baik.



3. Rekomendasi:

- Secara umum, program-program yang ada telah berjalan dengan efisien dan efektif, namun perlu terus dipantau untuk memastikan konsistensi kinerja di masa mendatang.

Dengan demikian, tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran dan capaian kinerja secara keseluruhan sudah baik.





## IV. PENUTUP

### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pertanian

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian seperti yang tertuang dalam segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat tinggi.

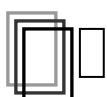
Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil pencapaian indikator kinerja tujuan yaitu meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dengan indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) tahun 2024 dari target sebesar Rp. 7.197.900.000.000 realisasi Rp. 7.587.800.000.000 atau 105,42%
2. Kinerja Sasaran meningkatnya nilai produksi pertanian dengan indikator kinerja sasaran nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan tahun 2024 dari target Rp. 3.493.577.855.000 realisasi 3.522.750.475.282 atau 100,84%
3. Kinerja sasaran meningkatnya kematangan OPD Dinas Pertanian dengan indikator kinerja nilai kematangan OPD dari target nilai 39 realisasi nilai SAKIP 38 atau 97,44 %
4. Kinerja sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Dinas Pertanian dengan indikator kinerja nilai SAKIP Dinas Pertanian dari target nilai 72,16 realisasi nilai SAKIP 72,16 atau 100,01 %.

### B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dimasa yang akan datang :

1. Program penyuluhan pertanian (pembentukan kelompok pemuda tani, duta petani milenial/andalan, jaringan petani nasional, bintek, pelatihan dan magang bagi poktan/gapoktan, pendampingan dan penyuluhan penguatan kelembagaan poktan/gapoktan oleh PPL, sekolah lapang, webinar.
2. Mekanisasi/modernisasi pertanian melalui bantuan alsintan, pelatihan operator alsintan, demplot/denfarm teknologi budidaya pertanian, peningkatan IP, penggunaan bibit unggul, inseminasi buatan, pakan fermentasi perbaikan pasca panen, penerapan pupuk berimbang, SIMURP.





3. Pembangunan/peningkatan prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani, dam parit, embung, sumur pantek, irigasi perpipaan, pompanisasi, bantuan bibit dan gerakan penanaman tanaman keras produktif bernilai konservasi tinggi (perkebunan dan hortikultura/buah-buahan) seperti kopi, kelapa, alpokat, manggis, durian pada daerah atas/tangkapan air.
4. Perbaikan penyaluran pupuk subsidi, pengembangan pelatihan dan aplikasi pupuk organik berbahan baku lokal, pembuatan mikro organisme lokal (MOL), pupuk berimbang, pengembangan poktan penangkar benih mandiri, pemagangan penangkaran benih kentang dan strowbery dari kultur jaringan, penyediaan screen house perbenihan.
5. Gerakan pengendalian hama tanaman, sekolah lapang pengendalian hama terpadu, trap barrier system, bantuan obat pengendali OPT, bantuan alsintan pengendalian OPT, pengobatan ternak masal, vaksinasi, asuransi usaha tani padi, penanaman refugia, pembuatan rumah burung hantu (rubuha), bantuan BBM pompanisasi dan brigade alsintan.
6. Mendorong akses kredit program KUR pertanian, kredit mawar (melawan rentenir), bantuan penguatan usaha/kegiatan kelembagaan tani, pasar tani off line dan on line, kemitraan petani / poktan/gapoktan/KUB dengan perusahaan perdagangan besar dan industri, pelatihan pemasaran online, perbaikan penanganan pasca panen, grading, bantuan alat panen, pasca panen dan pengolahan (cold storage, alat/mesin kemas, pengembangan pertanian organik, pengembangan komoditas pertanian eksport, dan gerakan konsumsi produk petani lokal).
7. Optimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Purbalingga, 6 Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga

  
**REVON HAPRINDIAT, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731005 199303 1 005

